

**Agama dan Kekerasan Politik di Indonesia  
(Studi pada Kasus Pemberitaan di Media Internet)**

**Muhammad Kasim**

Religious studies, Pascasarjana,  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
h898381@gmail.com

**Abstract**

This paper discusses religion and political violence in Indonesia. The main problem in this research is the existence of political views which say that religion can be used as a tool in achieving power, so that violence often appears as a side effect. This research question is contained in the first two main questions, how violence in the name of religion can occur from a political perspective. Second, how is the phenomenon of cases of political violence in the name of religion in Indonesia. The method in this research is a case study method on several news published as news on the internet. The main sources in this research are the news about political violence in the name of religion which is published in Kompas.com, detiknews.com, people's minds.com, and CNN.com newspapers. Secondary sources in this research are articles discussing religion and political violence published in scientific journals. The results of this study come to the conclusion that religion is often used as a tool to achieve power in relationships. Then physical or non-physical violence occurs as a result which is a political act. Physical violence occurred in the internal attacks experienced by minority groups from the majority group such as attacks on Christians in Aceh, and non-physical violence occurred with the practice of applying rules that seemed to have been trumped up by government apparatus on church building regulations in Aceh.

*Keywords: Political Violence; Religion; The case of Indonesia.*

**Abstrak**

Tulisan ini membahas tentang agama dan kekerasan politik yang terjadi di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah terdapatnya pandangan politik yang

mengatakan bahwa agama bisa dijadikan sebagai alat dalam mencapai kekuasaan, sehingga tak jarang kekerasan muncul sebagai efek sampingnya. Pertanyaan penelitian ini termuat dalam dua pertanyaan utama pertama, bagaimana kekerasan atas nama agama bisa terjadi dalam pandangan politik. Kedua, bagaimana fenomena kasus kekerasan politik yang mengatasnamakan agama di Indonesia. Metode dalam penelitian ini adalah metode studi kasus pada beberapa pemberitaan yang dimuat sebagai berita-berita dalam internet. Sumber utama dalam penelitian ini yaitu pemberitaan mengenai kekerasan politik atas nama agama yang dimuat dalam harian kompas.com, detiknews.com, pikiran rakyat.com, dan CNN.com. sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu artikel-artikel yang membahas tentang agama dan kekerasan politik yang dimuat di jurnal-jurnal ilmiah. Hasil dari penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa agama sering dijadikan alat sebagai pencapai kekuasaan dalam hubungannya. Kemudian kekerasan secara fisik maupun non-fisik terjadi sebagai akibatnya yang merupakan tindak politik. Kekerasan secara fisik terjadi pada penyerangan-penyerangan dalam yang dialami oleh kelompok minoritas dari kelompok mayoritas seperti penyerangan terhadap kaum kristiani di Aceh, dan kekerasan secara non-fisik terjadi dengan praktek penerapan aturan yang terkesan diada-adakan oleh aparat pemerintah pada aturan pembangunan gereja di Aceh.

*Kata kunci: Agama; Kasus Indonesia; Kekerasan Politik.*

## **Pendahuluan**

Indonesia adalah Negara yang majemuk. Kemajemukan tersebut tertumpu pada beberapa campuran dan juga intensitas yang ada di dalamnya. Indonesia merupakan Negara yang didalamnya terdapat berbagai suku, bangsa, dan juga agama. Dengan wilayah dan juga posisi yang luas menjadikan Indonesia mempunyai karakteristiknya tersendiri. Karakteristik tersebut kemudian didasarkan pada berbagai lapisan masyarakatnya yang dimulai dengan ribuan bahasa dan juga berbagai suku yang telah menempati wilayah Nusantara selama berabad-abad lamanya. Keberadaan masyarakat Indonesia yang majemuk dan juga beragam tersebut juga didukung oleh sumber daya alam yang sangat beragam dan mampu menjadi solusi dari kebutuhan masyarakat di dalamnya. Kemudian ciri khusus yang dimiliki bangsa Indonesia adalah sifat dan juga

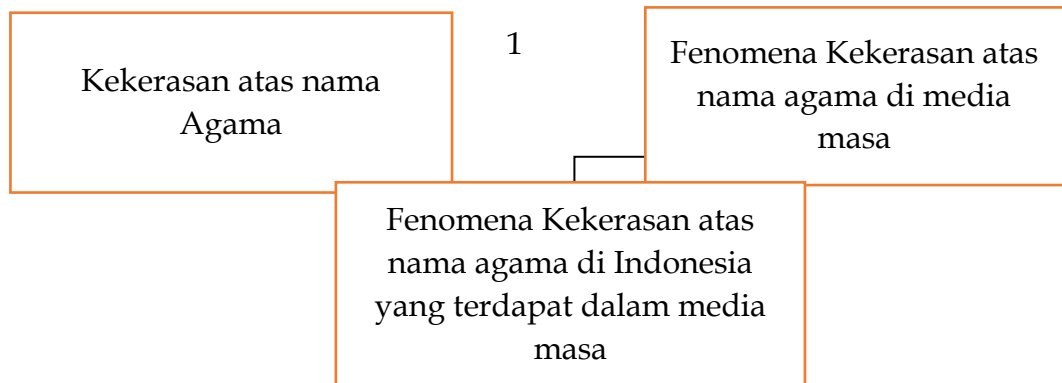
tata krama yang dimilikinya sampai saat ini dan terkenal dengan sebutan warga paling ramah. Tentu saja dengan berbagai aspek yang dimilikinya mampu menjadikan Indonesia menjadi Negara dengan sejuta potensi dan Negara yang makmur di hadapan dunia. Potensi Indonesia dari berbagai karakteristik masyarakatnya yang sampai saat ini ada menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan SDM yang sangat potensial menjadi Negara maju. Tetapi meskipun begitu, dengan keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia ini kemudian tidak sedikit permasalahan yang ditimbulkan (Betrand Russell, 2004). Berbagai masalah hadir sebagai rongrongan dan juga hambatan dalam pengelolaan Negara baik dari segi faktor internal maupun eksternal (Azyumardi Azra, 1994).

Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia adalah persoalan tentang agama. Agama yang dimiliki dan dianut oleh masyarakat Indonesia tidak hanya satu. Secara resmi agama yang diakui di Indonesia ada 6 agama yaitu, Islam, Kristen, Katholik, Konghucu, Hindu dan Budha. Selain daripada agama juga, Indonesia memiliki banyak aliran kepercayaan yang saat ini masih dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat Indonesia dengan slogan yang sering disematkan adalah “para penghayat kepercayaan.” Salah satu bentuk dari konflik tersebut adalah adanya kekerasan. Kekerasan dengan mengatasnamakan agama di Indonesia sering terjadi sejalan dengan sejarah perkembangan bangsa. Beberapa konflik tersebut muncul dalam berbagai bentuk yaitu bentuk kekerasan secara fisik maupun non fisik. Kemudian yang disebut dengan kekerasan adalah fenomena politik dan juga sosiologis dan memiliki sifat kolektif dalam artian dilakukan secara masif dan terstruktur. Maka dari itu permasalahan utama dalam penelitian ini hendak membahas tentang kekerasan politik atas nama agama yang terjadi di Indonesia. Beberapa kekerasan tersebut pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, salah satunya adalah kasus yang dialami oleh masyarakat kristiani Aceh pada tahun 2015. Pada saat itu, saat gereja di Aceh dirobokkan oleh aparat karena dianggap tidak memiliki perizinan yang sah dalam pembangunannya, maka terpaksa umat kristiani melaksanakan kebaktian di bawah terpal biru sebagai atap gereja dan tanah sebagai lantainya (Karl Mannheim, 1991).

Permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu terdapatnya beberapa fenomena pemberitaan media yang dimuat di internet seperti pada kompas.com, detikmews.com dan CNN Indonesia.com mengenai kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama khususnya di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejalan dengan permasalahan utama maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fenomena kekerasan atas nama agama di Indonesia dalam pemberitaan media massa internet. Penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena kekerasan atas nama agama di Indonesia khususnya dalam pemberitaan media

massa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk pengemabngan moderasi beragama dengan latar belakang permasalahan yang real terjadi seperti yang termuat dalam media massa tersebut. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan penelitian selanjutnya dan pengembangan lebih serius mengenai permasalahan keagamaan yang terjadi di Indonesia.

Kerangka berpikir dibutuhkan dalam penelitian ini guna menjelaskan alur dari penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti. Alur logis dari penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan permasalahan utama yaitu terdapatnya fenomena mengenai kekerasan atas nama agama dalam ruang pemberitaan media massa di Internet. Bila disajikan dalam bentuk gambar maka akan seperti berikut:



**Gambar 1.** Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1. Kekerasan atas nama agama merupakan fenomena yang sudah terjadi dalam perjalanan umat manusia. Sebut saja misal dalam Islam, perang shiffin yang terjadi masa kekhalifahan ali bin Abi Thalib merupakan fenomena yang berdampak hingga sekarang. Permasalahan utama dalam terjadinya perang tersebut adalah motif politik kekuasaan. Kekuasaan yang diperebutkan menyoal tentang kepemimpinan khalifah yang didalamnya dibumbui dengan motif agama. Karena dalam pandangan beberapa tokoh misalnya Karl Marx mengatakan bahwa agama adalah pelipur lara bagi kaum tertindas. Tetapi lebih jauh daripada itu agama sebagai sesuatu hal yang transenden dari kehidupan manusia dapat menjadi pondasi dari suatu gerakan yang terstruktur dan dalam menjalankannya manusia secara yakin menjalaninya. Agama sendiri dalam posisinya sebagai doktrin seakan mengarahkan bahwa tindak kekerasan merupakan suatu hal yang dibolehkan dalam kondisis-kondisi tertentu. Fenomena seperti jihad juga merupakan hal yang bersumber dari doktrin agama (Hanneman samuel, 2012).

Di Indonesia sendiri fenomena kekerasan atas nama agama sering terjadi. Hal itu terjadi dari beberapa tahun lalu seiring dengan perjalanan sejarah. Kekerasan yang terjadi bisa terjadi antar umat beragama, kemudian antar umat dalam satu agamanya, lalu kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah atau Negara terhadap pemeluk agama. Pemberitaan dari media massa sebagai media peluas informasi tidak henti-hentinya kehilangan konten dalam memuat tema bahasan tersebut. Beberapa konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia tidak lepas pengaruhnya dari keberagaman kepercayaan yang dianut di masyarakat Indonesia. Kemudian posisi media massa dalam perkembangannya mengalami pembaharuan yang sangat pesat. Posisi media sebagai penyampai informasi turut berkembang sengan perjalanan perkembangan internet. Penyampaian dan juga perluasan informasi kini lebih efektif dan bisa dilakukan dengan acara yang singkat. Dalam kondisi sekarang yang didukung dengan kecanggihan teknologi menjadikan siapapun bisa menjadi penyebar informasi. Pemberitaan tentang kekerasan dan juga seputar masalah keagamaan dalam ruang media masa kini dapat dengan mudah di akses lewat *smartphone*. Sejak beberapa tahun terakhir semua media massa yang berbasis internet seperti *detiknews*, *kompas*, pikiran rakyat secara konsisten memberikan update tentang isu kekerasan atas nama agama.

Dalam penelusuran peneliti, penelitian mengenai tema yang sama telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya sebagai berikut :

*Pertama*, Edi Purwanto dengan judul “Peran Ekonomi, politik, dan Sosial dalam Kekerasan Atas Nama Agama.” Penelitian tersebut menggunakan pendekatan studi pustaka. Penelitian tersebut mengkaji tentang beberapa pandangan dari berbagai ahli yang ditemui oleh peneliti melalui referensinya, kemudian peneliti mensintesa pendapat tersebut. Penelitian tersebut berusaha mengungkap tentang hubungan antara agama dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat dalam berbagai perspektif ahli, serta berusaha mengungkap tentang apa motif sebenarnya yang melatarbelakangi terjadinya suatu kekerasan. Hasil dari penelitian tersebut sampai pada kesimpulan secara konseptual, bahwa kekerasan dapat terjadi dengan dilatarbelakangi oleh kelompok penguasa dalam mempertahankan kekuasaan, kemudian kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertindas dilatarbelakangi oleh motif kebebasan dan kemerdekaan. Selain daripada itu juga terdapat keuntungan yang diperoleh para politisi dalam pembuatannya terhadap tindak kekerasan tersebut yaitu berupa keuntungan politis, dan kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh pemimpin agama memberikan keuntungan tersendiri secara politis karena agama posisinya menjadi sesuatu hal yang transenden dalam diri manusia (Purwanto, 2019).

*Kedua*, Cornelis Lay dengan judul “Kekerasan Atas Nama Agama: Perspektif Politik” penelitian tersebut membahas tentang kekerasan atas nama agama yang terjadi di berbagai lapisan baik dalam agama sendiri maupun lintas agama, serta kekerasan yang dilakukan oleh Negara terhadap pemeluk agama. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode studi pustaka. Hasil dari penelitian tersebut sampai pada kesimpulan bahwa kekerasan yang terjadi dengan motif agama terjadi dalam kasus penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah di Bogor. Kemudian kekerasan lintas agama terjadi pada kasus perusakan gereja yang terjadi dari tahun 1996. Kemudian kekerasan yang dilakukan oleh Negara terhadap pemeluk agama terjadi pada kasus Madi dari kota palu yang mana ia dituduh telah mengembangkan ajaran sesat dan pengawasan terhadap 3 polisi. Madi kemudian mendapat tuduhan bahwa ia menyebarkan ajaran sesat dengan cara melarang orang Islam untuk shalat di masjid dan berpuasa (Cornelis Lay, 2009).

*Ketiga*, Muhammad Al Fadilah dengan judul “Dari masjid ke Panggung Politik; Studi Kasus Peran Pemuka Agama dan Politisi Dalam Konflik Kekerasan Agama antara Komunitas Sunni dan Syiah Di Sampang Jawa Timur” penelitian tersebut merupakan penelitian yang hendak membahas fenomena perselisihan antara kelompok sunni dan syiah di Sampang Jawa timur dengan perspektif politik. Penelitian tersebut sampai pada kesimpulan bahwa kekerasan yang terjadi akibat pertentangan politik antara kelompok minoritas (Syiah) dan kelompok Mayoritas (Sunni) yang terjadi di Jawa timur tersebut tidak terdapat motif yang menunggangi perselisihan tersebut. Penelitian Yang dilakukan oleh beliau hanya sampai pada penjelasan kekerasan secara fisik. Dalam penelitiannya beliau menggunakan 5 hipotesis dan hasilnya hipotesis tersebut saling melengkapi meskipun didalamnya hanya menjadi penjelas bagi tindak kekerasan (Muhammad Alfadilah, 2013) .

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang hendak dilakukan sekarang terdapat dalam tema mengenai motif kekerasan atas nama agama. Tetapi perbedaan yang significant terdapat pada konten atau objek yang hendak diteliti di penelitian sekarang yaitu pemberitaan pada media massa yang termuat dalam internet.

Agama dalam posisinya dipercaya oleh masyarakat bahwa di dalamnya merupakan seperangkat aturan yang membahas tentang bagaimana cara hidup manusia. Kemudian posisi agama menjadi penting dalam kehidupan manusia apalagi kalau membicarakan konteks di Indonesia. Agama seakan menjadi kewajiban yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kekerasan, merupakan suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat modern. Hal tersebut kemudian bereaksi dengan kehidupan manusia secara menyeluruh. Kekerasan sendiri merupakan fenomena politik sosial yang kemudian bersifat universal. Perlakuan

kekerasan tersebut kemudian bisa berelasi dengan sistem yang dilakukan oleh individual, kolektif serta instuisis dan juga sistem yang menyeluruh. Kekerasan sendiri merupakan fenomena yang bisa berlangsung secara horizontal dan juga vertikal dan bahkan bisa mengkombinasikan keduanya. Kekerasan juga pada sifatnya bisa dilakukan dengan cara yang terbuka dan tertutup dan hal itu didasarkan pada kebutuhan dari kekerasan itu terjadi. Salah satu contoh yang mengekspresikan kekerasan pada ruang domestic pada perempuan. Selama beberapa tahun kekerasan secara tidak langsung terhadap perempuan dilakukan dengan cara terbuka hingga menimbulkan persepsi yang melekat kuat dalam sebuah kehidupan masyarakat. Ekspresi dari sebuah kekerasan juga sangat beragam, hal itu bisa tercermin dalam sikap yang vulgar maupun sikap yang sifatnya verbal atau tersimpul dari perlakuan tertentu. Akar dari terjadinya kekerasan sangat beragam baik yang bersifat agama maupun tanan kebutuhan ekonomi serta kepentingan yang lainnya. Kemudian pada posisinya kekerasan bisa terjadi dari akibat keserakahan manusia dalam menjalankan kehidupannya, sebagaimana yang diungkapkan oleh pendekatan psikologi sosial misalnya yang mengatakan bahwa kekerasan bisa terjadi akibat dari pertarungan dua insting dan melekat kuat pada libido makhluk hidup dan berakhir dengan dominasi terhadap thanatos dan merupakan insting perusak eros dalam posisinya sebagai insting dari kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan sisanya merupakan faktor dari hal-hal yang bersifat struktural misalnya kondisis politik dan juga ekonomi. Disini bisa dilihat bahwa faktor yang bersumber secara individual dapat menjadikan sistem yang terstruktur yang mengarah pada perlakuan seseorang dalam suatu sistem terstruktur halnya dalam agama dan juga politik (Peter L. Berger Brigitte Berger dan Hansfired Kellner, 1992)

Kekerasan Politik dapat terjadi dalam kehidupan manusia akibat dari serakahnya manusia akan kehausan panggung kekuasaan. Kemudian relasi yang muncul dari kekerasan ini adalah terdapatnya motif politik yang bersinggungan dengan kekuasaan. Kekuasaan yang dipertaruhkan dan juga diperebutkan hingga pada akhirnya menjadikan manusia terjatuh dalam keadaan saling bersaing satu sama lain untuk memperebutkan hal tersebut. Adanya faktor politik dalam suatu tatanan masyarakat merupakan sebab dari terjadinya kekerasan yang bersifat terstruktur, hal ini kemudian seperti diungkapkan oleh Geertz seorang kritikus sosial dalam bukunya *The Interpretation of culture* yang mengatakan bahwa adanya struktur kekuasaan dalam masyarakat yang tercermin dalam sebuah budaya adalah usaha pernyataan tentang kekuasaan (*exertion of power*) dari beberapa kategori struktur yang sedang berkontestasi (peter L. Berger, 1990)p. Sedangkan aspek yang lain yang juga terdapat dalam kontestasi masyarakat seperti agama merupakan pernyataan yang bersifat pemilahan secara askriptif dalam masyarakat. Kekerasan dalam kacamata

moral manusia memang merupakan hal yang sangat tidak masuk akal bahkan bisa dianggap sebagai tindakan yang mencedraikan nilai kemanusiaan itu sendiri, tetapi bagi hal lain seperti persaingan politik dan juga perebutan kekuasaan hal tersebut kemudian menjadi rasional. Dalam beberapa riset yang dilakukan oleh para ahli mengatakan bahwa tindakan kekerasan merupakan pilihan yang rasional dalam konteks yang berhubungan dengan politik atau orientasi dari politik itu sendiri mengenai kekuasaan. Salah satu ahli yang menerangkan adalah Lichbach yang menggunakan kata kunci "Selective incentive" dalam menjelaskan keterlibatan petani dalam suatu pergolakan misal gerakan buruh tani, hal itu kemudian disebabkan dari adanya penawaran berupa harapan agar hidup lebih baik di masa depan, sehingga mereka mau terlibat dalam beberapa pergerakan massal dan berakhir dengan kekerasan. Sedangkan jika melihat di Indonesia sendiri tidak dari kekerasan terjadi dalam berbagai aspek. Aspek tersebut bisa terjadi dalam kekerasan politik dan juga kekerasan dalam bentuk yang lainnya.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang tidak menggunakan data angka sebagai referensinya atau data utamanya (Yusuf, 2016). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi lapangan. Penelitian ini dilakukan terhadap pemberitaan yang terdapat di media massa yang membahas tentang isu-isu keagamaan. Sumber utama atau sumber primer Dalam penelitian ini yaitu beberapa pemberitaan yang dimuat dalam media massa seperti kompas.com, CNN Indonesia, pikiran rakyat, detik.com detik. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa artikel yang telah dimuat di jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang isu-isu keagamaan dan juga kekerasan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah diantaranya observasi yang dilakukan pada media-media pemberitaan seperti kompas.com, detiknews.com, CNN Indonesia dan media pemberitaan lainnya. Selepas daripada itu langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan beberapa referensi tersebut dan menyajikannya dalam bentuk data tertulis atau data deskriptif, setelah melakukan pemilahan atau triangulasi pada data-data tersebut. Langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti adalah menyajikan data tersebut dalam bentuk data deskriptif yang nantinya akan dimuat di hasil dan pembahasan (Gunawan, 2013).



## Hasil dan Pembahasan

### 1. Kasus Kekerasan di Indonesia Berdasarkan Variasinya

Indonesia menjadi Negara dengan penyumbanhg etraktif dalam isu kekerasan yang didasarkan pada politik dan juga agama pada beberapa tahun terakhir. Beberapa pemberitaan yang termuat dalam media massa menunjukkan bahwa beberapa kisah tragis yang mengatasnamakan agama kemudian bermunculan. Kondisi ini kemudian menjadikan negeri Indonesia menjadi arsip perpustakaan dengan dengan segudang permasalahan mengenai agama sebagai landasan utamanya. Kemudian kasus yang terjadi dengan motif keagamaan tersebut berimplikasi pada kekuasaan politik. Beberapa variasi dari kasus tersebut bisa diperjelas sebagai berikut:

Kekerasan(Abad Badruzzaman, 2005) dalam ranah agama sendiri, yang kemudian diukur dari para aktor terlibat. Kasus ini kemudian menyertakan beberapa actor didalamnya seperti ormas yang terdapat dalam suatu agama yang sama. Kekerasan yang terjadi dan dilakukan atas dasar agama oleh Negara berdasarkan ukurannya mengenai keterlibatan Negara dalam berbagai aturan yang mengatur tentang agama di Indonesia dan pengaturannya dalam satu aspek tertentu (Martahan Sohuturon, 2018). Kemudian praktek kekerasan yang dilakukan oleh Negara dengan landasan agama sebagai dasarnya terletak pada posisi dari suatu lembaga yang dijadikan sebagai pemegang otoritas tertinggi di suatu Negara (Yulio et al., 2018) .

Kemudian kekerasan yang dilakukan oleh komunitas tertentu yang berbeda agama. Hal ini kemudian berimplikasi pada kelompok minoritas yang sengaja dilakukan oleh kelompok mayoritas. Hal ini kemudian sering terjadi di Indonesia dengan melibatkan aktor dalam ormas tertentu dan dilakukan terhadap kelompok komunitas agama yang lain. Tindak kekerasan kemudian terjadi pula dengan pelibatan dari ormas tertentu terhadap komunitas agama yang berbeda dengannya. Dalam kondisi yang satu ini kemudian secara khusus menampilkan diri dalam bentuk raut kekerasan verbal atau simbolik. Kemudian pelibatan Negara dalam hal ini juga ditemui salah satunya adalah dalam bentuk peraturan tertentu mengenai keagamaan (Samsyuduha Wildansyah, 2018). Selain daripada itu juga variasi tentang tidak kekerasan agama ada juga yang terjadi dengan penilaian diluar ajaran agama. Kemudian aktivitas tersebut tercermin dalam aktivitas pemberantasan yang dilakukan oleh ormas tertentu tentang suatu hal yang dianggap perilaku kemaksiatan. Kemudian variasi jenis kekerasan ini juga terdapat dalam kelompok masyarakat yang melakukan penyerangan dan pemberantasan terhadap kelompok yang dianggap melakukan tindak kemaksiatan dan yang lain sebagainya (Emile Durkheim, 1992). Berdasarkan variasi tersebut maka peneliti mengungkap

dan menemukan beberapa kasus yang termuat dalam media informasi di internet tentang permasalahan tindak kekerasan atas nama agama dan juga akhirnya berimplikasi pada permasalahan kekuasaan (Peter L. Berger Briggite Berger dan Hansfried Kellner, 1992). Dalam pandangan peneliti hal tersebut kemudian berdampak pada kekerasan politik yang artinya tindak kekerasan tersebut dilakukan secara masif dan juga terstruktur.

## **2. Kasus Tindak Kekerasan Agama dan Kekerasan Politik dalam Media Massa**

Kasus yang terjadi dengan dasar masalah keagamaan di Indonesia pada pemberitaan yang dimuat di kompas.com pada tahun 2020 meliputi berbagai kasus sebagai berikut: Dalam data yang diterima oleh kompas.com bahwa di Indonesia sendiri sampai pada tahun 2012 menerima sebanyak 2398 kasus kekerasan dan juga diskriminasi yang dialami oleh masyarakat beragama. Hal ini juga berjalan setelah 14 tahun Indonesia mengalami masa reformasi Kompas menyatakan bahwa dari jumlah kasus sebanyak itu 65% diantaranya berlandaskan atau dilatarbelakangi oleh agama. Kemudian sisanya sebanyak 20% merupakan kasus kekerasan yang didasarkan pada etnik kemudian sebanyak 15% kasus-kasus tentang tindak kekerasan terjadi pada kekerasan gender dan sisanya 5% merupakan kasus yang membahas tentang kekerasan seksual (Arie Welianto, 2020).

Dari beberapa kasus yang dilaporkan tersebut sebagian besar kasus yang terjadi di Indonesia bisa meluas dalam skala daerah dan hal ini juga yang menimbulkan kerugian secara material yang tidak sedikit. Konflik-konflik tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Konflik Ambon, dalam perjalanan masa reformasi, konflik yang terjadi di Ambon ini merupakan konflik yang tercatat sebagai konflik paling besar di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah korban jiwa dalam konflik ini mencapai 10.000 orang. Sesuai dengan yang diberitakan oleh kompas.com pada tanggal 19 bulan ke-1 tahun 2020 bahwa konflik yang terjadi di Ambon ini berlangsung dari tahun 1999 sampai 2003. Kerugian dari berbagai aspek pun tidak dielakkan dari konflik tersebut diantaranya warga yang meninggal kemudian ribuan rumah dan fasilitas umum termasuk tempat ibadah yang terbakar. Selain daripada itu juga dampak dari konflik tersebut mengakibatkan warganya memutuskan untuk meninggalkan rumah dan meninggalkan pulau Maluku karena dirasa bahwa konflik tersebut menimbulkan dampak yang tidak baik dan senantiasa mengancam kehidupan mereka hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpindah tempat.

Konflik Sampit, dalam berita yang dimuat di kompas.com konflik Sampit merupakan konflik yang terjadi di Kalimantan tengah dan terjadi pada tahun 2001. Bentrokan tersebut atau konflik tersebut terjadi pada

warga suku Dayak dan suku Madura pada 18 Februari 2001. Konflik tersebut kemudian dikabarkan oleh harian kompas.com pada tanggal 13 bulan ke-6 tahun 2018 meluas sampai satu pulau yaitu provinsi Kalimantan tengah termasuk ibukota Palangkaraya. Konflik tersebut diduga berlandaskan pada bidang ekonomi hal ini juga sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Komnas HAM yang diwakili oleh badan penyelidikan pelanggaran HAM Sampit. Lembaga tersebut kemudian dibentuk oleh HAK guna menyelidiki apa motif dan juga kasus yang melatarbelakangi terjadinya konflik ini. Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh yayasan Denny ja tercatat bahwa konflik tersebut memakan korban sekitar 469 orang yang sampai meninggal. Dampak dari konflik tersebut juga mengarah pada warga sebanyak 108.000 orang harus mengungsi dari Kalimantan tengah.

Kerusuhan tahun 1998, Pada tahun 1998 Indonesia terjatuh dalam posisi yang sangat krisis. Kondisi krisis tersebut mengarah pada hal keuangan ekonomi negara hingga pada pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Dalam pemberitaan yang dimuat di kompas.com bahwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 13 sampai 15 Mei tahun 1998 dilatarbelakangi oleh motif kekuasaan yaitu terpilihnya kembali Soeharto menjadi presiden Indonesia. Dalam beberapa kasus yang terjadi selama kerusuhan tersebut setidaknya banyak terjadi pembunuhan dan juga pemerkosaan, sehingga 70.000 orang harus mengungsi. Dari kasus tersebut kemudian menimbulkan respon kritis daripada para mahasiswa yang pada akhirnya mahasiswa memperlihatkan keprihatinan terhadap kondisi negara dengan melakukan aksi langsung turun ke jalan. Selama kasus tersebut kemudian beberapa mahasiswa yang sampai menumpahkan darah secara mayoritas berasal dari universitas Trisakti Jakarta. Pada posisinya tersebut mahasiswa harus langsung berhadapan dengan aparat keamanan negara yaitu tentara dan polisi, tak cukup sampai di situ mereka sampai dikejar-kejar ke wilayah kampus yaitu kampus Trisakti. Meskipun demikian pada akhirnya meninggalnya kawan-kawan mahasiswa yang terjadi dalam kerusuhan tersebut tidak menimbulkan penurunan semangat dari mahasiswa-mahasiswa yang lain. Bahkan dengan keadaan tersebut pada akhirnya malah mengundang lebih luas amarah mahasiswa untuk memenuhi gedung DPR MPR RI. Kemudian dalam pemberitaan yang dimuat kompas.com kerugian yang dicapai oleh negara akibat kerusakan tersebut mencapai 2,5 triliun rupiah. Kemudian dengan kondisi tersebut memaksa Soeharto untuk turun dari kursi kekuasaannya karena ia melihat bahwa Indonesia betul-betul dalam keadaan krisis.

Konflik Ahmadiyah, konflik Ahmadiyah terjadi di Indonesia sekitar tahun 2016-2017. Dalam pemberitaan yang dimuat di kompas.com, meskipun tidak banyak menimbulkan korban jiwa dalam dalam konflik tersebut menjadi kasus yang mendapat sorotan paling banyak oleh media.

Hal itu dikarenakan Ahmadiyah di Indonesia dianggap sebagai aliran sesat. Dalam sejarahnya Ahmadiyah adalah kelompok ormas Islam yang berdiri dengan tokoh pendirinya Mirza Ghulam Ahmad.. tuliskan beberapa konflik yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016-2017 beberapa orang pengungsi selama 8 tahun menjadi tidak jelas statusnya. Hal ini kemudian berdampak pada mereka yang sulit mendapatkan fasilitas pemerintah seperti KTP BPJS dan yang lainnya.

Kasus konflik Poso, konflik yang terjadi di Poso merupakan konflik yang mengatasnamakan agama. Konflik tersebut merupakan konflik-konflik yang terjadi akibat bersih tegangnya kelompok muslim dengan kelompok Kristen. Konflik tersebut kemudian berlangsung selama 3 tahun yaitu dari tahun 1998 sampai tahun 2001. Meskipun begitu beberapa usaha rekonsiliasi untuk mempertemukan antara komunitas masyarakat Muslim dan Kristen yang berisi tegang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Lirik konsiliasi tersebut kemudian muncullah penandatanganan atas deklarasi Malino pada tahun 2001. Dalam pemberitaan yang dimuat di kompas.com, korban jiwa dari kasus tersebut belum diketahui secara pasti namun dari beberapa keterangan yang dijumpai di daerah tempat konflik tersebut mengatakan bahwa korban jiwa selalu berjatuh selama prosesi konflik tersebut.

Kasus Ahmadiyah di Bangka, Pemberitaan tentang konflik keagamaan yang menyangkut suatu kelompok organisasi masyarakat yaitu Ahmadiyah juga dimuat dalam pemberitaan oleh CNN Indonesia. Pada pemerintahan tersebut dimuat dengan judul “pemerintah pusat diminta cegah Bupati Bangka usir Ahmadiyah.” Pemberitaan tersebut dimuat pada tanggal 5 Februari tahun 2016 pukul 11.12. pada konflik yang terjadi tersebut terjadi sebuah diskriminasi terhadap kelompok Ahmadiyah yang merupakan kelompok minoritas di kabupaten Bangka. Pada posisinya kemudian kelompok minoritas Ahmadiyah tersebut di kabupaten Bangka diusir oleh bupatinya. Hal itu juga dikarenakan desakan dari beberapa ormas yang ada di kabupaten Bangka. Kemudian dalam pemberitaan yang dimuat di CNN Indonesia dijelaskan bahwa jemaat Ahmadiyah cabang Bangka diperintahkan untuk mengosongkan tempatnya hingga 5 Februari tahun 2016. Daerah yang dikosongkan tersebut adalah daerah Sri menanti, kecamatan Sungailiat, kabupaten Bangka. Dalam pemberitaan tersebut juga seorang perwakilan lembaga dari setara institut melaporkan bahwa terdapat 197 peristiwa yang menyangkut soal kebebasan beragama atau berkeyakinan yang terjadi di kabupaten Bangka. Kemudian ketua dari lembaga setara institut tersebut yang bernama hendardi meminta pemerintah untuk secara serius menanggapi permasalahan yang terjadi khususnya tentang kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Bupati Bangka tersebut. Karena dalam posisinya jika jemaat Ahmadiyah cabang Bangka tersebut tidak mengosongkan tempat kediamannya sampai tanggal yang

ditentukan maka pihak pemerintahan kabupaten Bangka akan melakukan pengusiran secara paksa atau pengosongan tempat secara paksa menggunakan aparaturnya (Martahan Sohuturon, 2018).

Kemudian dalam pemberitaan yang dimuat dalam CNN Indonesia tentang kebebasan beragama paling tinggi di Jawa Barat. Pemberitaan dalam CNN Indonesia tersebut membahas tentang beberapa kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ada di Jawa Barat. Pada hasilnya ditemui sebanyak 20 pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada tahun 2015. Dalam pemberitaan tersebut juga dijelaskan bahwa dalam penanganan kasus Ahmadiyah, pemerintah hanya melarang tentang kelompok Ahmadiyah tersebut untuk menyebarkan ajarannya. Tetapi pemerintah pada posisinya tidak melarang jemaat Ahmadiyah untuk melaksanakan ibadahnya di tempat-tempat tertentu seperti masjid Ahmadiyah dengan adanya bentuk peraturan yang seperti demikian maka menimbulkan kerancuan tersendiri bagi masyarakat yang ada di Jawa Barat khususnya hal itu kemudian menimbulkan beberapa pertikaian dan juga konflik yang terjadi.

### **Kesimpulan**

Dari apa yang telah dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa fakta mengenai kekerasan politik yang berlandaskan atas nama agama marak terjadi di Indonesia. Beberapa fakta tersebut adalah pemberitaan yang terdapat di media massa khususnya dalam media koran yang dulu bisa diakses oleh masyarakat dengan cara offline. Sedangkan dalam kondisi sekarang pemberitaan tersebut bisa diakses melalui internet. Dari hasil penelusuran penulis juga ditemukan bahwa fakta-fakta tentang variasi kekerasan atas nama agama yang berimplikasi terhadap keputusan politik dijumpai dalam beberapa pemberitaan media tersebut. Variasi yang paling banyak adalah membahas tentang kekerasan secara fisik yang diterima oleh kelompok minoritas khususnya di Indonesia. Kekerasan tersebut misalnya dialami oleh kelompok jemaat Ahmadiyah. Dalam posisinya kasus-kasus tersebut terjadi sangat melebar dan juga bersifat kompleks. Hal itu baik dalam segi konflik yang melibatkan aspek kekuasaan langsung maupun secara tidak langsung. Pelibatan aspek kekuasaan secara langsung ditunjukkan pada bentuk peraturan-peraturan yang berimplikasi pada kebijakan mengenai kelompok minoritas tersebut. Hal ini misalnya seperti keputusan tentang pelarangan jamaah Ahmadiyah untuk menyebarkan ajarannya. Jika dilihat dari aspek politiknya maka keberadaan jemaat Ahmadiyah ini tidak sama sekali berbeda dengan kelompok-kelompok ormas masyarakat yang lainnya seperti NU Muhammadiyah ataupun persis. Dalam praktek kesehariannya ormas-ormas tersebut juga menyebarkan beberapa ajaran dan juga pahamnya tetapi hal ini menjadi tidak berlaku bagi kelompok jamaah Ahmadiyah.

Selain dari kelompok Jumat Ahmadiyah juga kelompok-kelompok muslim yang lainnya yang mendapatkan kekerasan secara politik maupun bentuk aturan yang didasari pada kekuatan otoritas dari desakan masyarakat mayoritas yang terjadi di beberapa daerah yang menyangkut soal kelompok Kristiani. Pada posisinya kelompok Kristiani ini dibatasi dengan berbagai aturan yang cenderung dipersulit untuk menjalankan keyakinannya dan kebebasan beragamanya. Hal ini kemudian bertentangan dengan undang-undang pasal 27 a yang mengatakan bahwa Indonesia menjamin kebebasan beragama dari setiap warga negaranya. Jika dilihat lebih jauh tentang apa yang terjadi saat ini bentuk-bentuk peraturan ataupun kebijakan yang keluar dari pemerintah selalu dilatarbelakangi oleh motif politik ataupun motif kekuasaan meskipun pada dasarnya hal itu mengatur tentang masalah keagamaan maupun keyakinan yang ada di Indonesia.

Penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan, diantaranya adalah kekurangan pada aspek objek yang diteliti yang dilakukan oleh peneliti yang hanya berfokus pada pemberitaan media sosial. Maka dari itu peneliti merekomendasikan untuk melakukan penelitian selanjutnya diantaranya adalah penelitian yang membahas tentang isu kekerasan agama dan politik dalam lingkup yang lebih mendalam. Hal ini bisa dilakukan misal dengan melakukan pengkajian secara mendalam tentang aspek teoritis tentang pembuatan hukum dan juga undang-undang ataupun peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai kebijakan keagamaan.

#### **Daftar Pustaka**

- Abad Badruzzaman. (2005). *Kiri Islam Hasan Hanafi: Menggugat Kemapanan Agama dan Politik*. . Tiara Wacana.
- Arie Welianto. (2020). kasus kekerasan yang di picu maslaah keberagamaan di Indonesia. *Kompas.Com*, 1.
- Azyumardi Azra. (1994). *Pasca Modernisme, Islam dan Politik. Ullumul Quran, v, 01*.
- Betrand Russell. (2004). *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio Politik dari Kuno Hingga Sekarang, terj. Sigit Jatmiko (dkk)*. Pustaka pelajar.
- Cornelis Lay. (2009). *Kekerasan Atas Nama Agama: Perspektif Politik. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 13(1), 1-19*.
- Emile Durkheim. (1992). *The elemnetary form of the religious life (2nd ed.)*. Free Press.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara, 143*.
- Hanneman samuel. (2012). *Peter Berger: sebuah Pengantar Ringkas*. kepik.
- Karl Mannheim. (1991). *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik. Terj. F. Budi Hardiman*. Kanisius.

- Martahan Sohuturon. (2018). Penyerang Gereja Sleman cari mtarget lewat internet. *CNN Indonesia*, 2.
- Muhammad Alfadilah. (2013). Dari Masjid ke Panggung Politik; Studi kasus peran pemuka agama anatar komunitas Sunni dan syiah di Sampang JAwa timur. *Universitas Gajah Mada*, 4(1), 114-131.
- peter L. Berger. (1990). *langit suci sebagai realitas* (2nd ed.). LP3ES.
- Peter L. Berger Brigitte Berger dan Hansfired Kellner. (1992). *Pikiran Kembara: Modernisasi dan Kesadarn Manusia*. Terj. A. Widyamartaya. . Kanisius.
- Purwanto, E. (2019). Peran ekonomi Politik dan Soasial dalam kekerasan atas nama Agama. *Jurnal Theologi Dan Pendidikan Kristiani*, 4(1), 111-126.
- Samsyuduha Wildansyah. (2018). Wakapolri: Keamanan Pemuka Agama di jamin. *Detiknews.Com*, 3.
- Yulio, I. G. N., Putra Dewa, M., & Putra, N. R. A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak. *Ojs.Unud.Ac.Id*, 1-15.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.